

**Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis  
Tata Cara Pergeseran Anggaran.**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
KELOMPOK PENDAPATAN, JENIS PENDAPATAN, OBYEK PENDAPATAN  
DAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN**

Tahun Anggaran 2009

4	<b>PENDAPATAN</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH ..... Kelompok Pendapatan</b>
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah ..... Jenis Pendapatan</b>
4.1.1.1	Pajak Hotel .....Obyek Pendapatan
4.1.1.1.1	Pajak Losmen / Rmh Penginapan/Pesanggarahan/Hostel/Rmh Kos .....Rincian Obyek Pendapatan
4.1.1.1.2	Hotel Bintang Lima
4.1.1.2	Pajak Restoran
4.1.1.2.1	Rumah Makan
4.1.1.2.2	Katering
4.1.1.3	Pajak Hiburan
4.1.1.3.1	Balap Motor
4.1.1.3.2	Panti Pijat/Refleksi
4.1.1.4	Pajak Reklame
4.1.1.4.1	Reklame Papan/Bill Board/Videotro/Megatron
4.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan
4.1.1.5.1	Pajak Penerangan Jalan PLN
4.1.1.5.2	Pajak Penerangan Jalan Non PLN
4.1.1.5.3	Pertamax Plus
4.1.1.5.4	Solar
4.1.1.5.5	Gas
4.1.1.6	Pajak Pengambilan Galian Golongan C
4.1.1.6.1	Pasir
4.1.1.6.2	Kerikil
4.1.1.6.3	Tanah Uruk
4.1.1.6.4	Sirtu
4.1.1.6.5	Tanah Liat, Bata dan Genteng
4.1.1.6.6	Batu Gunung
4.1.1.7	Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet
4.1.1.7.1	Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>
4.1.2.1	Retribusi Jasa Umum
4.1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.1.2.1.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4.1.2.1.3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
4.1.2.1.4	Retribusi Pasar
4.1.2.1.5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4.1.2.1.6	Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum
4.1.2.1.7	Retribusi Tambat Kapal
4.1.2.1.8	Retribusi Pas Masuk Bandara Melalui
4.1.2.1.9	Retribusi izin usaha angkutan sungai
4.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.1.2.2.2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
4.1.2.2.3	Retribusi Tempat Pelelangan
4.1.2.2.4	Retribusi Terminal
4.1.2.2.5	Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.1.2.2.6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4.1.2.2.7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
4.1.2.2.8	Retribusi Penyeberangan Air
4.1.2.2.9	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4.1.2.2.10	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa
4.1.2.2.11	Ijin Pengusahaan Galian Golongan C
4.1.2.2.12	Retribusi Hasil Hutan Ikutan
4.1.2.2.13	Retribusi Pendaftaran Perusahaan

4 . 1 . 2 . 2 . 14	Retribusi Usaha Perdagangan dan Ijin Industri
4 . 1 . 2 . 2 . 15	Retribusi Ijin Usaha Angkutan Barang
4 . 1 . 2 . 2 . 16	Retribusi Surat Tanda Kecakapan ( STK )
4 . 1 . 2 . 3	Retribusi Perizinan Tertentu
4 . 1 . 2 . 3 . 1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4 . 1 . 2 . 3 . 2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
4 . 1 . 2 . 3 . 3	Retribusi Izin Gangguan / Keramaian (HO)
4 . 1 . 2 . 3 . 4	Retribusi Izin Trayek
4 . 1 . 2 . 3 . 5	Retribusi Izin Usaha Perikanan
4 . 1 . 2 . 3 . 6	Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet
4 . 1 . 2 . 3 . 7	Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan
4 . 1 . 2 . 3 . 8	Retribusi izin lokasi
4 . 1 . 2 . 3 . 9	Retribusi SIUJK
4 . 1 . 2 . 4	Retribusi Pengujian Tertentu
4 . 1 . 2 . 4 . 1	Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
4 . 1 . 2 . 5	Retribusi Jasa Pelayanan
4 . 1 . 2 . 5 . 1	Retribusi Jasa Pelayanan Tera / Tera Ulang
4 . 1 . 3	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>
4 . 1 . 3 . 1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4 . 1 . 3 . 1 . 1	BUMD Bank Kaltim Cabang Melak
4 . 1 . 3 . 1 . 2	Perusda Kehutanan
4 . 1 . 3 . 1 . 3	Perusda Perkebunan
4 . 1 . 3 . 1 . 4	Perusda Pertambangan
4 . 1 . 3 . 2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
4 . 1 . 3 . 2 . 1	BUMN.....
4 . 1 . 3 . 3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4 . 1 . 3 . 3 . 1	Bank Pembangunan Daerah (BPD)
4 . 1 . 3 . 4	Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi kepada Pihak Ketiga
4 . 1 . 4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>
4 . 1 . 4 . 1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
4 . 1 . 4 . 1 . 1	Pelepasan Hak Atas Tanah
4 . 1 . 4 . 1 . 2	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai
4 . 1 . 4 . 1 . 3	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai
4 . 1 . 4 . 1 . 4	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4 . 1 . 4 . 1 . 5	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
4 . 1 . 4 . 1 . 6	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
4 . 1 . 4 . 1 . 7	Penjualan Drum Bekas
4 . 1 . 4 . 1 . 8	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4 . 1 . 4 . 1 . 9	Penjualan Lampu Hias Bekas
4 . 1 . 4 . 1 . 10	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan
4 . 1 . 4 . 1 . 11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
4 . 1 . 4 . 1 . 12	Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi
4 . 1 . 4 . 1 . 13	Penjualan hasil pertanian
4 . 1 . 4 . 1 . 14	Penjualan hasil kehutanan
4 . 1 . 4 . 1 . 15	Penjualan hasil perkebunan
4 . 1 . 4 . 1 . 16	Penjualan hasil peternakan
4 . 1 . 4 . 1 . 17	Penjualan hasil perikanan
4 . 1 . 4 . 1 . 18	Penjualan hasil sitaan
4 . 1 . 4 . 1 . 19	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
4 . 1 . 4 . 2	Penerimaan Jasa Giro
4 . 1 . 4 . 2 . 0	Jasa Giro
4 . 1 . 4 . 2 . 1	Jasa Giro Kas Daerah
4 . 1 . 4 . 2 . 2	Jasa Giro Pemegang Kas
4 . 1 . 4 . 2 . 3	Jasa Giro Dana Cadangan
4 . 1 . 4 . 2 . 4	Jasa Giro Gaji
4 . 1 . 4 . 2 . 5	Jasa Giro Kas DAK-DR
4 . 1 . 4 . 2 . 6	Jasa Giro Kas DAK-Kesehatan
4 . 1 . 4 . 2 . 7	Jasa Giro Kas DAK-Pendidikan
4 . 1 . 4 . 2 . 8	Jasa Giro Kas AD HOC II
4 . 1 . 4 . 2 . 9	Jasa Giro Kas Dana HWS
4 . 1 . 4 . 2 . 10	Jasa Giro Kas Subsidi Propinsi
4 . 1 . 4 . 2 . 11	Jasa Giro Dana Penyesuaian Infrastruktur

4 . 1 . 4 . 2 . 12	Jasa Dana Prasarana Pemerintah
4 . 1 . 4 . 2 . 13	Jasa Giro Kas Kelautan
4 . 1 . 4 . 2 . 14	Jasa Giro Kas Dana Lingkungan Hidup
4 . 1 . 4 . 2 . 15	Jasa Giro Kas Pertanian
4 . 1 . 4 . 3	Pendapatan Bunga Deposito
4 . 1 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Bunga
4 . 1 . 4 . 3 . 2	Rekening Deposito Pada Bank
4 . 1 . 4 . 4	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
4 . 1 . 4 . 4 . 1	Tuntutan Ganti Rugi
4 . 1 . 4 . 4 . 2	Kerugian Keuangan Daerah
4 . 1 . 4 . 4 . 3	Kerugian Barang Daerah
4 . 1 . 4 . 5	Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4 . 1 . 4 . 5 . 1	Penerimaan Komisi dari .....
4 . 1 . 4 . 5 . 2	Penerimaan Potongan dari .....
4 . 1 . 4 . 5 . 3	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari .....
4 . 1 . 4 . 6	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4 . 1 . 4 . 6 . 1	Bidang Pendidikan
4 . 1 . 4 . 6 . 2	Bidang Kesehatan
4 . 1 . 4 . 6 . 3	Bidang Pekerjaan Umum
4 . 1 . 4 . 6 . 4	Bidang Perumahan Rakyat
4 . 1 . 4 . 6 . 5	Bidang Penataan Ruang
4 . 1 . 4 . 6 . 6	Bidang Perencanaan Pembangunan
4 . 1 . 4 . 6 . 7	Bidang Perhubungan
4 . 1 . 4 . 6 . 8	Bidang Lingkungan Hidup
4 . 1 . 4 . 6 . 9	Bidang Pertanahan
4 . 1 . 4 . 7	Pendapatan Denda Pajak
4 . 1 . 4 . 7 . 1	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4 . 1 . 4 . 7 . 2	Pendapatan Denda Pajak Restoran
4 . 1 . 4 . 7 . 3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4 . 1 . 4 . 7 . 4	Pendapatan Denda Pajak Reklame
4 . 1 . 4 . 7 . 5	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4 . 1 . 4 . 7 . 6	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian C
4 . 1 . 4 . 7 . 7	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4 . 1 . 4 . 7 . 8	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah
4 . 1 . 4 . 7 . 9	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet
4 . 1 . 4 . 7 . 10	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan
4 . 1 . 4 . 8	Pendapatan Denda Retribusi
4 . 1 . 4 . 8 . 1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 4 . 8 . 2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 4 . 8 . 3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
4 . 1 . 4 . 9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4 . 1 . 4 . 9 . 1	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
4 . 1 . 4 . 9 . 2	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4 . 1 . 4 . 9 . 3	Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman
4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan dari Pengembalian
4 . 1 . 4 . 10 . 1	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4 . 1 . 4 . 10 . 2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan
4 . 1 . 4 . 10 . 3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan
4 . 1 . 4 . 10 . 4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas
4 . 1 . 4 . 10 . 5	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka
4 . 1 . 4 . 10 . 6	Pengembalian dari PT. Taspen
4 . 1 . 4 . 11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
4 . 1 . 4 . 11 . 1	Fasilitas Sosial
4 . 1 . 4 . 11 . 2	Fasilitas Umum
4 . 1 . 4 . 12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4 . 1 . 4 . 12 . 1	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
4 . 1 . 4 . 12 . 2	Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan
4 . 1 . 4 . 12 . 3	Uang Ujian kenaikan tingkat/kelas
4 . 1 . 4 . 13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4 . 1 . 4 . 13 . 1	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah
4 . 1 . 4 . 13 . 2	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan
4 . 1 . 4 . 14	Sumbangan Pihak Ketiga
4 . 1 . 4 . 14 . 1	Sumbangan Pihak Ketiga
4 . 1 . 4 . 15	Penerimaan Lain-Lain

4.1.4.15.1	Penerimaan Lain-Lain
4.1.4.15.2	Jasa Pelayanan Medis
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>
4.2.1	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak
4.2.1.1.1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4.2.1.1.2	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.2.1.1.3	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
4.2.1.1.4	Biaya Pemungutan PBB Tahun 2008
4.2.1.1.5	Pembagian Insentif atas Pencapaian Target Pemungutan PBB Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2007
4.2.1.1.6	Bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lain
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4.2.1.2.1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
4.2.1.2.2	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4.2.1.2.3	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4.2.1.2.4	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
4.2.1.2.5	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4.2.1.2.6	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4.2.1.2.7	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4.2.1.2.8	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4.2.1.2.9	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4.2.1.2.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4.2.2	<b>Dana Alokasi Umum</b>
4.2.2.1	Dana Alokasi Umum
4.2.2.1.1	Dana Alokasi Umum
4.2.2.2	Dana Tunjangan Kependidikan DAU
4.2.2.2.1	Dana Tunjangan Kependidikan DAU
4.2.3	<b>Dana Alokasi Khusus</b>
4.2.3.1	Dana Alokasi Khusus
4.2.3.1.1	Dana alokasi khusus- Pendidikan
4.2.3.1.2	Dana Alokasi Khusus - Kesehatan
4.2.3.1.3	Dana Alokasi Khusus - Jalan
4.2.3.1.4	Dana alokasi khusus - Irigasi
4.2.3.1.5	Dana alokasi khusus - AIR Minum dan Penyehatan Lingkungan
4.2.3.1.6	Dana alokasi khusus - Kelautan dan Perikanan
4.2.3.1.7	Dana alokasi khusus - Pertanian
4.2.3.1.8	Dana alokasi khusus - Lingkungan Hidup
4.2.3.1.9	Dana alokasi khusus - Perdagangan
4.2.4	<b>Dana Penyesuaian</b>
4.2.4.1	Dana Penyesuaian
4.2.4.1.1	Dana Penyesuaian
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>
4.3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>
4.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4.3.1.1.1	Pemerintah
4.3.1.2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4.3.1.2.1	Pemerintah Daerah....
4.3.1.3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
4.3.1.3.1	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta....
4.3.1.4	Pendapatan Hibah dari Kelompok masyarakat/perorangan
4.3.1.4.1	Kelompok masyarakat/perorangan
4.3.1.5	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
4.3.1.5.1	Pendapatan Hibah dari Bilateral
4.3.1.5.2	Pendapatan Hibah dari Multilateral
4.3.1.5.3	Pendapatan Hibah dari Donor lainnya
4.3.2	<b>Dana Darurat</b>
4.3.2.1	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.3.2.1.1	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.3.3	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>
4.3.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.3.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi .....
4.3.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten

4 . 3 . 3 . 2 . 1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten .....
4 . 3 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4 . 3 . 3 . 3 . 1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota .....
4 . 3 . 4	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>
4 . 3 . 4 . 1	Dana Penyesuaian
4 . 3 . 4 . 1 . 1	Dana Penyesuaian .....
4 . 3 . 4 . 2	Dana Otonomi Khusus
4 . 3 . 4 . 2 . 1	Dana Otonomi Khusus.....
4 . 3 . 5	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah</b>
	<b>Lainnya</b>
4 . 3 . 5 . 1	Bantuan Keuangan dari Provinsi
4 . 3 . 5 . 1 . 1	Bantuan Keuangan Dari Provinsi .....
4 . 3 . 5 . 2	Bantuan Keuangan dari Kabupaten
4 . 3 . 5 . 2 . 1	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten .....
4 . 3 . 5 . 3	Bantuan Keuangan dari Kota
4 . 3 . 5 . 3 . 1	Bantuan Keuangan Dari Kota .....

ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 12 Juli 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**ISMAIL THOMAS**

**Lampiran II : Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis  
Tata Cara Pergeseran Anggaran.**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA, OBYEK BELANJA  
DAN RINCIAN OBYEK BELANJA**

Tahun Anggaran 2009

5	<b>BELANJA</b>	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> .....	<b>Kelompok Belanja</b>
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b> .....	<b>Jenis Belanja</b>
5.1.1.1	Gaji dan Tunjangan .....	Obyek Belanja
5.1.1.1.1	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi .....	Rincian Obyek Belanja
5.1.1.1.2	Tunjangan Keluarga	
5.1.1.1.3	Tunjangan Jabatan	
5.1.1.1.4	Tunjangan Fungsional	
5.1.1.1.5	Tunjangan Fungsional Umum	
5.1.1.1.6	Tunjangan Beras	
5.1.1.1.7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	
5.1.1.1.8	Pembulatan Gaji	
5.1.1.1.9	Iuran Asuransi Kesehatan	
5.1.1.1.10	Uang Paket	
5.1.1.1.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	
5.1.1.1.12	Tunjangan komisi	
5.1.1.1.13	Tunjangan Panitia Anggaran	
5.1.1.1.14	Tunjangan Badan kehormatan	
5.1.1.1.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	
5.1.1.1.16	Tunjangan Perumahan	
5.1.1.1.17	Uang Duka Wafat/ Tewas	
5.1.1.1.18	Uang jasa Pengabdian	
5.1.1.1.19	Tunjangan Penunjang Kesejahteraan	
5.1.1.1.20	Tunjangan Refrensentasi	
5.1.1.1.21	Tunjangan Penunjang Jabatan	
5.1.1.1.22	Tunjangan Penunjang Kegiatan	
5.1.1.1.23	Tunjangan Penunjang Kesejahteraan Pegawai	
5.1.1.1.24	Biaya Insentif Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural	
5.1.1.2	Tambahan Penghasilan PNS	
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	
5.1.1.2.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	
5.1.1.2.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	
5.1.1.2.4	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	
5.1.1.2.5	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	
5.1.1.3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	
5.1.1.3.1	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	
5.1.1.3.2	Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	
5.1.1.3.3	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	
5.1.1.4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.1.4.1	Biaya Pemungutan PBB	
5.1.1.4.2	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.1.5	Pembagian Insentif Atas Pencapaian Target Pemungutan PBB	
5.1.1.5.1	Pembagian Insentif Atas Pencapaian Target Pemungutan PBB Perkotaan dan Pedesaan	
5.1.2	<b>Belanja Bunga</b>	
5.1.2.1	Bunga Utang Pinjaman	
5.1.2.1.1	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	
5.1.2.1.2	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya	
5.1.2.1.3	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	
5.1.2.1.4	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
5.1.2.1.5	Bunga Utang Pinjaman Lainnya	
5.1.2.2	Bunga Utang Obligasi	
5.1.2.2.1	Bunga Utang Obligasi	
5.1.3	<b>Belanja Subsidi</b>	

5.1.3.1	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga
5.1.3.1.1	Belanja Subsidi kepada Perusahaan
5.1.3.1.2	Belanja Subsidi kepada Lembaga
5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>
5.1.4.1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.4.1.1	Pemerintah Pusat
5.1.4.2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5.1.4.2.1	Pemerintah Daerah
5.1.4.3	Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa
5.1.4.3.1	Pemerintah Desa
5.1.4.4	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN
5.1.4.4.1	Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN
5.1.4.5	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
5.1.4.5.1	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
5.1.4.6	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan
5.1.4.6.1	Kelompok Masyarakat/Perorangan
5.1.5	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>
5.1.5.1	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
5.1.5.1.1	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan ....
5.1.5.2	Belanja Bantuan Partai Politik
5.1.5.2.1	Belanja Bantuan Partai Politik
5.1.5.3	Belanja Bantuan Keagamaan
5.1.5.3.1	Belanja Bantuan Kagamaan
5.1.5.4	Belanja Bantuan Olahraga dan Kepemudaan
5.1.5.4.1	Belanja Bantuan Olahraga dan Kepemudaan
5.1.5.5	Belanja Bantuan Pendidikan
5.1.5.5.1	Belanja Bantuan Pendidikan
5.1.5.6	Belanja Bantuan Kesejahteraan Sosial
5.1.5.6.1	Belanja bantuan kesejahteraan sosial
5.1.6	<b>Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</b>
5.1.6.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi
5.1.6.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi ...
5.1.6.2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.2.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota ...
5.1.6.3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.3.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...
5.1.6.4	Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.4.1	Belanja Bagi Hasil retribusi kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.5.1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ....
5.1.7	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>
5.1.7.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
5.1.7.1.1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi .....
5.1.7.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota
5.1.7.2.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota .....
5.1.7.3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
5.1.7.3.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa .....
5.1.7.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan
5.1.7.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya
5.1.7.5.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan
5.1.7.5.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota .....
5.1.7.5.3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa ...
5.1.8	<b>Belanja Tidak Terduga</b>
5.1.8.1	Belanja Tidak Terduga
5.1.8.1.1	Belanja Tidak Terduga
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>

5.2.1.1	Honorarium PNS
5.2.1.1.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.1.2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
5.2.1.1.3	Honorarium Bulanan
5.2.1.1.4	Honorarium Peserta
5.2.1.1.5	Honorarium Lainnya
5.2.1.2	Honorarium Non PNS
5.2.1.2.1	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.1.2.2	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap
5.2.1.2.3	Honorarium Bulanan
5.2.1.2.4	Honorarium Peserta
5.2.1.2.5	Honorarium Lainnya
5.2.1.2.6	Honorarium Tenaga Tim Penghubung
5.2.1.3	Uang Lembur
5.2.1.3.1	Uang Lembur PNS
5.2.1.3.2	Uang Lembur Non PNS
5.2.1.4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5.2.1.4.1	Belanja Beasiswa tugas belajar D3
5.2.1.4.2	Belanja Beasiswa tugas belajar S1
5.2.1.4.3	Belanja Beasiswa tugas belajar S2
5.2.1.4.4	Belanja Beasiswa tugas belajar S3
5.2.1.4.5	Belanja Beasiswa Lainnya
5.2.1.5	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5.2.1.5.1	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
5.2.1.5.2	Belanja Sosialisasi
5.2.1.5.3	Belanja bimbingan teknis
5.2.1.5.4	Belanja kursus/sosialisasi/bimtek lainnya
5.2.1.6	Tambahan Penghasilan selain Gaji/Honorarium
5.2.1.6.1	Tambahan khusus penghasilan berdasarkan pekerjaan
5.2.1.6.2	Tambahan khusus kesejahteraan pegawai
5.2.1.6.3	Belanja bimbingan teknis
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5.2.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
5.2.2.1.1	Belanja Alat Tulis kantor
5.2.2.1.2	Belanja Dokumen/Administrasi tender
5.2.2.1.3	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5.2.2.1.4	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5.2.2.1.5	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.2.2.1.6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.1.7	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5.2.2.1.8	Belanja Pengisian Tabung Gas
5.2.2.1.9	Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya
5.2.2.1.10	Belanja Alat / Perlengkapan
5.2.2.1.11	Belanja Pengadaan Travo
5.2.2.1.12	Belanja Perlengkapan Alat Kantor dan Taman
5.2.2.2	Belanja Bahan/Material
5.2.2.2.1	Belanja Bahan Baku Bangunan
5.2.2.2.2	Belanja Bahan / Bibit Tanaman
5.2.2.2.3	Belanja Bibit Ternak
5.2.2.2.4	Belanja Bahan Obat-obatan
5.2.2.2.5	Belanja Bahan Kimia
5.2.2.2.6	Belanja bahan Material Lainnya
5.2.2.2.7	Belanja bahan dan jasa pemeliharaan jaringan/bangunan air lainnya
5.2.2.3	Belanja Jasa Kantor
5.2.2.3.1	Belanja Telepon
5.2.2.3.2	Belanja Air
5.2.2.3.3	Belanja Listrik
5.2.2.3.4	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang
5.2.2.3.5	Belanja Surat Kabar / Majalah
5.2.2.3.6	Belanja Kawat / Faksimili/ Internet
5.2.2.3.7	Belanja Paket / Pengiriman
5.2.2.3.8	Belanja Sertifikat
5.2.2.3.9	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.2.2.3.10	Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum



5 . 2 . 2 . 3 . 11	Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 2 . 3 . 12	Belanja Jasa Kantor lainnya
5 . 2 . 2 . 3 . 13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
5 . 2 . 2 . 3 . 14	Belanja Jasa Publikasi
5 . 2 . 2 . 3 . 15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5 . 2 . 2 . 3 . 16	Belanja Akomodasi dan Transportasi
5 . 2 . 2 . 3 . 17	Belanja Akomodasi dan Transportasi
5 . 2 . 2 . 3 . 18	Belanja Pemeliharaan Kantor dan Taman
5 . 2 . 2 . 3 . 19	Belanja Jasa Perencanaan
5 . 2 . 2 . 3 . 20	Belanja Jasa Pengawasan
5 . 2 . 2 . 3 . 21	Belanja Jasa Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 3 . 22	Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung/Rumah/Taman/Peralatan RT
5 . 2 . 2 . 3 . 23	Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Komunikasi
5 . 2 . 2 . 3 . 24	Biaya Pembinaan Kegiatan Marching Band " Sangkakala " Setkab. Kutai Barat
5 . 2 . 2 . 3 . 25	Belanja Jasa Pemantauan Pembangunan,Pemerintahan,Kesejahteraan Sosial,Politik dan Agama
5 . 2 . 2 . 3 . 26	Belanja Jasa Asset Derah
5 . 2 . 2 . 3 . 27	Belanja Jasa Kantor Lainnya
5 . 2 . 2 . 3 . 28	Belanja jasa penerimaan Negara Bukan Pajak
5 . 2 . 2 . 3 . 29	Belanja Jasa Pengurusan hak Atas Tanah
5 . 2 . 2 . 4	Belanja Premi Asuransi
5 . 2 . 2 . 4 . 1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5 . 2 . 2 . 4 . 2	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5 . 2 . 2 . 4 . 3	Belanja Jasa Perawatan dan Pengobatan
5 . 2 . 2 . 4 . 4	Belanja Premi Asuransi Lainnya
5 . 2 . 2 . 5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 2 . 5 . 1	Belanja Jasa Service
5 . 2 . 2 . 5 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2 . 2 . 5 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5 . 2 . 2 . 5 . 4	Belanja Jasa KIR
5 . 2 . 2 . 5 . 5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5 . 2 . 2 . 5 . 6	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5 . 2 . 2 . 5 . 7	Belanja Lain-lain Perawatan Kendaraan
5 . 2 . 2 . 6	Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 2 . 6 . 1	Belanja Cetak
5 . 2 . 2 . 6 . 2	Belanja Penggandaan
5 . 2 . 2 . 6 . 3	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya
5 . 2 . 2 . 6 . 4	Biaya Penjilidan
5 . 2 . 2 . 6 . 5	Biaya evaluasi dan pelaporan
5 . 2 . 2 . 6 . 6	Biaya dokumentasi
5 . 2 . 2 . 6 . 7	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya
5 . 2 . 2 . 7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 2 . 2 . 7 . 1	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5 . 2 . 2 . 7 . 2	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
5 . 2 . 2 . 7 . 3	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5 . 2 . 2 . 7 . 4	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
5 . 2 . 2 . 7 . 5	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan
5 . 2 . 2 . 7 . 6	Belanja Sewa Lainnya
5 . 2 . 2 . 7 . 7	Belanja Sewa Tempat Lainnya
5 . 2 . 2 . 8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 . 2 . 2 . 8 . 1	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5 . 2 . 2 . 8 . 2	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5 . 2 . 2 . 8 . 3	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
5 . 2 . 2 . 8 . 4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Lainnya
5 . 2 . 2 . 9	Belanja Sewa Alat Berat
5 . 2 . 2 . 9 . 1	Belanja sewa Eskavator
5 . 2 . 2 . 9 . 2	Belanja sewa Buldoser
5 . 2 . 2 . 9 . 3	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja sewa meja kursi
5 . 2 . 2 . 10 . 2	Belanja sewa komputer dan printer
5 . 2 . 2 . 10 . 3	Belanja sewa proyektor
5 . 2 . 2 . 10 . 4	Belanja sewa generator

5 . 2 . 2 . 10 . 5	Belanja sewa tenda
5 . 2 . 2 . 10 . 6	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja makanan dan minuman rapat
5 . 2 . 2 . 11 . 3	Belanja makanan dan minuman tamu
5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
5 . 2 . 2 . 11 . 5	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5 . 2 . 2 . 12 . 1	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
5 . 2 . 2 . 12 . 2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5 . 2 . 2 . 12 . 3	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5 . 2 . 2 . 12 . 4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5 . 2 . 2 . 12 . 5	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5 . 2 . 2 . 12 . 6	Belanja Atribut dan Perlengkapan Pakaian Lainnya
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja
5 . 2 . 2 . 13 . 1	Belanja pakaian kerja lapangan
5 . 2 . 2 . 13 . 2	Belanja pakaian kerja lainnya
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5 . 2 . 2 . 14 . 1	Belanja Pakaian KORPRI
5 . 2 . 2 . 14 . 2	Belanja pakaian adat daerah
5 . 2 . 2 . 14 . 3	Belanja pakaian batik tradisional
5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja pakaian olahraga
5 . 2 . 2 . 14 . 5	Belanja pakaian khusus lainnya
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja perjalanan dinas luar daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 3	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5 . 2 . 2 . 16 . 1	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
5 . 2 . 2 . 16 . 2	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Pemulangan Pegawai
5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
5 . 2 . 2 . 17 . 2	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
5 . 2 . 2 . 17 . 3	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Jasa Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 18 . 1	Belanja Dokumentasi
5 . 2 . 2 . 18 . 2	Belanja Dekorasi dan Spanduk
5 . 2 . 2 . 18 . 3	Belanja Transportasi dan Akomodasi
5 . 2 . 2 . 18 . 4	Belanja Tenaga non pegawai
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Perawatan Kesehatan
5 . 2 . 2 . 19 . 1	Belanja Perawatan Kesehatan
5 . 2 . 2 . 20	Belanja pemeliharaan
5 . 2 . 2 . 20 . 1	belanja pemeliharaan bangunan
5 . 2 . 2 . 20 . 2	Belanja pemeliharaan taman
5 . 2 . 2 . 20 . 3	Belanja pemeliharaan / alat kantor
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi
5 . 2 . 2 . 21 . 1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5 . 2 . 2 . 21 . 2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5 . 2 . 2 . 21 . 3	Belanja Jasa Konsultasi Manajemen
5 . 2 . 2 . 21 . 4	Belanja Jasa Konsultasi Akuntansi
5 . 2 . 2 . 21 . 5	Belanja Jasa Konsultasi Keperawatan
5 . 2 . 2 . 21 . 6	Belanja Jasa Pembersihan Alur Sungai
5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>
5 . 2 . 3 . 1	Belanja Modal Pengadaan Tanah
5 . 2 . 3 . 1 . 1	Belanja modal Pengadaan tanah kantor
5 . 2 . 3 . 1 . 2	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit
5 . 2 . 3 . 1 . 3	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas
5 . 2 . 3 . 1 . 4	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik
5 . 2 . 3 . 1 . 5	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak
5 . 2 . 3 . 1 . 6	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah

	dasar
5 . 2 . 3 . 1 . 7	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
5 . 2 . 3 . 1 . 8	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan
5 . 2 . 3 . 1 . 9	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus
5 . 2 . 3 . 1 . 10	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus
5 . 2 . 3 . 1 . 11	Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan
5 . 2 . 3 . 1 . 12	Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti jompo
5 . 2 . 3 . 1 . 13	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum terminal
5 . 2 . 3 . 1 . 14	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum dermaga
5 . 2 . 3 . 1 . 15	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis
5 . 2 . 3 . 1 . 16	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan
5 . 2 . 3 . 1 . 17	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan
5 . 2 . 3 . 1 . 18	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar
5 . 2 . 3 . 1 . 19	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
5 . 2 . 3 . 1 . 20	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman
5 . 2 . 3 . 1 . 21	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat
5 . 2 . 3 . 1 . 22	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum ibadah
5 . 2 . 3 . 1 . 23	Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga
5 . 2 . 3 . 1 . 24	Belanja modal Pengadaan tanah perumahan
5 . 2 . 3 . 1 . 25	Belanja modal Pengadaan tanah pertanian
5 . 2 . 3 . 1 . 26	Belanja modal Pengadaan tanah perkebunan
5 . 2 . 3 . 1 . 27	Belanja modal Pengadaan tanah perikanan
5 . 2 . 3 . 1 . 28	Belanja modal Pengadaan tanah peternakan
5 . 2 . 3 . 1 . 29	Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan
5 . 2 . 3 . 1 . 30	Belanja modal Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku
5 . 2 . 3 . 1 . 31	Belanja modal Pengadaan tanah untuk Jalan
5 . 2 . 3 . 1 . 32	Belanja modal Pengadaan tanah untuk Jembatan
5 . 2 . 3 . 1 . 33	Belanja Modal pengadaan tanah lainnya
5 . 2 . 3 . 2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5 . 2 . 3 . 2 . 1	Belanja modal Pengadaan traktor
5 . 2 . 3 . 2 . 2	Belanja modal Pengadaan buldozer
5 . 2 . 3 . 2 . 3	Belanja modal Pengadaan stoom wals
5 . 2 . 3 . 2 . 4	Belanja modal Pengadaan eskavator
5 . 2 . 3 . 2 . 5	Belanja modal Pengadaan dump truk
5 . 2 . 3 . 2 . 6	Belanja modal Pengadaan crane
5 . 2 . 3 . 2 . 7	Belanja modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan
5 . 2 . 3 . 2 . 8	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah semen
5 . 2 . 3 . 2 . 9	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)
5 . 2 . 3 . 2 . 10	Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Lainnya
5 . 2 . 3 . 3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5 . 2 . 3 . 3 . 1	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
5 . 2 . 3 . 3 . 2	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
5 . 2 . 3 . 3 . 3	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
5 . 2 . 3 . 3 . 4	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus
5 . 2 . 3 . 3 . 5	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
5 . 2 . 3 . 3 . 6	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
5 . 2 . 3 . 3 . 7	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)
5 . 2 . 3 . 3 . 8	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
5 . 2 . 3 . 3 . 9	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
5 . 2 . 3 . 3 . 10	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans

5 . 2 . 3 . 3 . 11	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran
5 . 2 . 3 . 3 . 12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
5 . 2 . 3 . 3 . 13	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
5 . 2 . 3 . 3 . 14	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan
5 . 2 . 3 . 3 . 15	Belanja modal angkutan darat bermotor lainnya
5 . 2 . 3 . 4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5 . 2 . 3 . 4 . 1	Belanja modal Pengadaan gerobak
5 . 2 . 3 . 4 . 2	Belanja modal Pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong
5 . 2 . 3 . 4 . 3	Belanja modal Pengadaan becak
5 . 2 . 3 . 4 . 4	Belanja modal Pengadaan sepeda
5 . 2 . 3 . 4 . 5	Belanja modal Pengadaan karavan
5 . 2 . 3 . 4 . 6	Belanja modal angkutan darat tidak bermotor lainnya
5 . 2 . 3 . 5	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
5 . 2 . 3 . 5 . 1	Belanja modal Pengadaan kapal motor
5 . 2 . 3 . 5 . 2	Belanja modal Pengadaan kapal feri
5 . 2 . 3 . 5 . 3	Belanja modal Pengadaan speed boat
5 . 2 . 3 . 5 . 4	Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel
5 . 2 . 3 . 5 . 5	Belanja modal Pengadaan hydro foil
5 . 2 . 3 . 5 . 6	Belanja modal Pengadaan jet foil
5 . 2 . 3 . 5 . 7	Belanja modal Pengadaan kapal tug boat
5 . 2 . 3 . 5 . 8	Belanja modal Pengadaan kapal tanker
5 . 2 . 3 . 5 . 9	Belanja modal Pengadaan kapal kargo
5 . 2 . 3 . 5 . 10	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan angkutan air bermotor lainnya
5 . 2 . 3 . 6	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor
5 . 2 . 3 . 6 . 1	Belanja modal Pengadaan perahu layar
5 . 2 . 3 . 6 . 2	Belanja modal Pengadaan perahu sampan
5 . 2 . 3 . 6 . 3	Belanja modal Pengadaan perahu tongkang
5 . 2 . 3 . 6 . 4	Belanja modal Pengadaan perahu karet
5 . 2 . 3 . 6 . 5	Belanja modal Pengadaanperahu rakit
5 . 2 . 3 . 6 . 6	Belanja modal Pengadaan perahu sekoci
5 . 2 . 3 . 6 . 7	Belanja modal pengadaan angkutan air tidak bermotor lainnya
5 . 2 . 3 . 7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara
5 . 2 . 3 . 7 . 1	Belanja modal Pengadaan pesawat kargo
5 . 2 . 3 . 7 . 2	Belanja modal Pengadaan pesawat penumpang
5 . 2 . 3 . 7 . 3	Belanja modal Pengadaan pesawat helikopter
5 . 2 . 3 . 7 . 4	Belanja modal Pengadaan pesawat pemadam kebakaran
5 . 2 . 3 . 7 . 5	Belanja modal Pengadaan pesawat capung
5 . 2 . 3 . 7 . 6	Belanja modal Pengadaan pesawat terbang ampibi
5 . 2 . 3 . 7 . 7	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Layang
5 . 2 . 3 . 8	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5 . 2 . 3 . 8 . 1	Belanja modal Pengadaan mesin las
5 . 2 . 3 . 8 . 2	Belanja modal Pengadaan mesin bubut
5 . 2 . 3 . 8 . 3	Belanja modal Pengadaan mesin dongkrak
5 . 2 . 3 . 8 . 4	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor
5 . 2 . 3 . 8 . 5	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset
5 . 2 . 3 . 8 . 6	Belanja Modal Alat-alat Pertukangan
5 . 2 . 3 . 8 . 7	Belanja Modal Alat-alat Sablon
5 . 2 . 3 . 8 . 8	Belanja Modal Pengadaan Mesin Lainnya
5 . 2 . 3 . 9	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5 . 2 . 3 . 9 . 1	Belanja modal Pengadaan penggiling hasil pertanian
5 . 2 . 3 . 9 . 2	Belanja modal Pengadaan alat pengering gabah
5 . 2 . 3 . 9 . 3	Belanja modal Pengadaan mesin bajak
5 . 2 . 3 . 9 . 4	Belanja modal Pengadaan alat penetas
5 . 2 . 3 . 9 . 5	Belanja modal pengadaan alat pertanian lainnya
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5 . 2 . 3 . 10 . 1	Belanja modal Pengadaan mesin tik
5 . 2 . 3 . 10 . 2	Belanja modal Pengadaan mesin hitung
5 . 2 . 3 . 10 . 3	Belanja modal Pengadaan mesin stensil
5 . 2 . 3 . 10 . 4	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy
5 . 2 . 3 . 10 . 5	Belanja modal Pengadaan mesin cetak

5 . 2 . 3 . 10 . 6	Belanja modal Pengadaan mesin jilid
5 . 2 . 3 . 10 . 7	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas
5 . 2 . 3 . 10 . 8	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
5 . 2 . 3 . 10 . 9	Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik
5 . 2 . 3 . 10 . 10	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik
5 . 2 . 3 . 10 . 11	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor Lainnya
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5 . 2 . 3 . 11 . 1	Belanja modal Pengadaan meja gambar
5 . 2 . 3 . 11 . 2	Belanja modal Pengadaan almari
5 . 2 . 3 . 11 . 3	Belanja modal Pengadaan brankas
5 . 2 . 3 . 11 . 4	Belanja modal Pengadaan filling kabinet
5 . 2 . 3 . 11 . 5	Belanja modal Pengadaan white board
5 . 2 . 3 . 11 . 6	Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu
5 . 2 . 3 . 11 . 7	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Kantor
5 . 2 . 3 . 11 . 8	Mesin Absensi
5 . 2 . 3 . 11 . 9	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer
5 . 2 . 3 . 12 . 1	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
5 . 2 . 3 . 12 . 2	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5 . 2 . 3 . 12 . 3	Belanja modal Pengadaan komputer note book
5 . 2 . 3 . 12 . 4	Belanja modal Pengadaan printer
5 . 2 . 3 . 12 . 5	Belanja modal Pengadaan scanner
5 . 2 . 3 . 12 . 6	Belanja modal Pengadaan monitor/display
5 . 2 . 3 . 12 . 7	Belanja modal Pengadaan CPU
5 . 2 . 3 . 12 . 8	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5 . 2 . 3 . 12 . 9	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5 . 2 . 3 . 12 . 11	Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi
5 . 2 . 3 . 12 . 12	Belanja modal Pengadaan komputer lainnya
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5 . 2 . 3 . 13 . 1	Belanja modal Pengadaan meja kerja
5 . 2 . 3 . 13 . 2	Belanja modal Pengadaan meja rapat
5 . 2 . 3 . 13 . 3	Belanja modal Pengadaan meja makan
5 . 2 . 3 . 13 . 4	Belanja modal Pengadaan kursi kerja
5 . 2 . 3 . 13 . 5	Belanja modal Pengadaan kursi rapat
5 . 2 . 3 . 13 . 6	Belanja modal Pengadaan kursi makan
5 . 2 . 3 . 13 . 7	Belanja modal Pengadaan tempat tidur
5 . 2 . 3 . 13 . 8	Belanja modal Pengadaan sofa
5 . 2 . 3 . 13 . 9	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Lainnya
5 . 2 . 3 . 13 . 11	Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5 . 2 . 3 . 14 . 1	Belanja modal Pengadaan tabung gas
5 . 2 . 3 . 14 . 2	Belanja modal Pengadaan kompor gas
5 . 2 . 3 . 14 . 3	Belanja modal Pengadaan lemari makan
5 . 2 . 3 . 14 . 4	Belanja modal Pengadaan dispenser
5 . 2 . 3 . 14 . 5	Belanja modal Pengadaan kulkas
5 . 2 . 3 . 14 . 6	Belanja modal Pengadaan rak piring
5 . 2 . 3 . 14 . 7	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
5 . 2 . 3 . 14 . 8	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
5 . 2 . 3 . 14 . 9	Belanja Modal Pengadaan Penampung Air
5 . 2 . 3 . 14 . 10	Belanja Modal Pengadaan Sarana Penunjang Peralatan Dapur
5 . 2 . 3 . 14 . 11	Belanja Modal pengadaan peralatan dapur lainnya
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5 . 2 . 3 . 15 . 1	Belanja modal Pengadaan lampu hias
5 . 2 . 3 . 15 . 2	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja
5 . 2 . 3 . 15 . 3	Belanja Modal Pengadaan Sarana Penunjang Ruangan
5 . 2 . 3 . 15 . 4	Belanja Modal Pengadaan penghias ruangan lainnya
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5 . 2 . 3 . 16 . 1	Belanja modal Pengadaan kamera
5 . 2 . 3 . 16 . 2	Belanja modal Pengadaan handycam
5 . 2 . 3 . 16 . 3	Belanja modal Pengadaan proyektor
5 . 2 . 3 . 16 . 4	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

5 . 2 . 3 . 17 . 1	Belanja modal Pengadaan telepon
5 . 2 . 3 . 17 . 2	Belanja modal Pengadaan faximili
5 . 2 . 3 . 17 . 3	Belanja modal Pengadaan radio SSB
5 . 2 . 3 . 17 . 4	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
5 . 2 . 3 . 17 . 5	Belanja modal Pengadaan radio VHF
5 . 2 . 3 . 17 . 6	Belanja modal Pengadaan radio UHF
5 . 2 . 3 . 17 . 7	Belanja modal Pengadaan alat sandi
5 . 2 . 3 . 17 . 8	Belanja modal pengadaan alat komunikasi lainnya
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
5 . 2 . 3 . 18 . 1	Belanja modal Pengadaan timbangan
5 . 2 . 3 . 18 . 2	Belanja modal Pengadaan teodolite
5 . 2 . 3 . 18 . 3	Belanja modal Pengadaan alat uji emisi
5 . 2 . 3 . 18 . 4	Belanja modal Pengadaan alat GPS
5 . 2 . 3 . 18 . 5	Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi
5 . 2 . 3 . 18 . 6	Belanja modal Pengadaan bejana ukur
5 . 2 . 3 . 18 . 7	Belanja modal Pengadaan barometer
5 . 2 . 3 . 18 . 8	Belanja modal Pengadaan seismograph
5 . 2 . 3 . 18 . 9	Belanja modal Pengadaan ultrasonograph
5 . 2 . 3 . 18 . 10	Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya
5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5 . 2 . 3 . 19 . 1	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
5 . 2 . 3 . 19 . 2	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi
5 . 2 . 3 . 19 . 3	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT
5 . 2 . 3 . 19 . 4	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata
5 . 2 . 3 . 19 . 5	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran unit gawat darurat
5 . 2 . 3 . 19 . 6	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak
5 . 2 . 3 . 19 . 7	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
5 . 2 . 3 . 19 . 8	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin
5 . 2 . 3 . 19 . 9	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi
5 . 2 . 3 . 19 . 10	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran neurologi
5 . 2 . 3 . 19 . 11	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi
5 . 2 . 3 . 19 . 12	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan
5 . 2 . 3 . 19 . 13	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi
5 . 2 . 3 . 19 . 14	Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis
5 . 2 . 3 . 19 . 15	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Lainnya
5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5 . 2 . 3 . 20 . 1	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi
5 . 2 . 3 . 20 . 2	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
5 . 2 . 3 . 20 . 3	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia
5 . 2 . 3 . 20 . 4	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian
5 . 2 . 3 . 20 . 5	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan
5 . 2 . 3 . 20 . 6	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan
5 . 2 . 3 . 20 . 7	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan
5 . 2 . 3 . 20 . 8	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa
5 . 2 . 3 . 20 . 9	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
5 . 2 . 3 . 20 . 10	Belanja modal pengadaan alat laboratorium lainnya
5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5 . 2 . 3 . 21 . 1	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan
5 . 2 . 3 . 21 . 2	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over
5 . 2 . 3 . 21 . 3	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan under pass
5 . 2 . 3 . 21 . 4	Belanja Modal Dermaga dan Rehab Jalan
5 . 2 . 3 . 21 . 5	Belanja Modal Alat alat Fasilitas Lalu Lintas Jalan
5 . 2 . 3 . 21 . 6	Belanja modal pengadaan jalan lainnya
5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5 . 2 . 3 . 22 . 1	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan gantung
5 . 2 . 3 . 22 . 2	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan ponton
5 . 2 . 3 . 22 . 3	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang
5 . 2 . 3 . 22 . 4	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
5 . 2 . 3 . 22 . 5	Belanja modal pengadaan jembatan lainnya
5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5 . 2 . 3 . 23 . 1	Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan
5 . 2 . 3 . 23 . 2	Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk

5 . 2 . 3 . 23 . 3	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
5 . 2 . 3 . 23 . 4	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah
5 . 2 . 3 . 23 . 5	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
5 . 2 . 3 . 23 . 6	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
5 . 2 . 3 . 23 . 7	Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir
5 . 2 . 3 . 23 . 8	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air
5 . 2 . 3 . 23 . 9	Belanja Modal Pengadaan Sumur/Normalisasi Sungai
5 . 2 . 3 . 23 . 10	Belanja modal pengadaan jaringan air limbah
5 . 2 . 3 . 23 . 11	Belanja modal pengadaan jaringan air lainnya
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
5 . 2 . 3 . 24 . 1	Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan
5 . 2 . 3 . 24 . 2	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman
5 . 2 . 3 . 24 . 3	Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5 . 2 . 3 . 25 . 1	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
5 . 2 . 3 . 25 . 2	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5 . 2 . 3 . 26 . 1	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5 . 2 . 3 . 26 . 2	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
5 . 2 . 3 . 26 . 3	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
5 . 2 . 3 . 26 . 4	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
5 . 2 . 3 . 26 . 5	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah
5 . 2 . 3 . 26 . 6	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen
5 . 2 . 3 . 26 . 7	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan
5 . 2 . 3 . 26 . 8	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Rumah Sakit
5 . 2 . 3 . 26 . 9	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Lainnya
5 . 2 . 3 . 26 . 10	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung sekolah
5 . 2 . 3 . 26 . 11	Belanja modal pengadaan konstruksi Pelabuhan
5 . 2 . 3 . 26 . 12	Belanja Modal pengadaan bangunan pasar
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5 . 2 . 3 . 27 . 1	Belanja modal Pengadaan buku matematika
5 . 2 . 3 . 27 . 2	Belanja modal Pengadaan buku fisika
5 . 2 . 3 . 27 . 3	Belanja modal Pengadaan buku kimia
5 . 2 . 3 . 27 . 4	Belanja modal Pengadaan buku biologi
5 . 2 . 3 . 27 . 5	Belanja modal Pengadaan buku biografi
5 . 2 . 3 . 27 . 6	Belanja modal Pengadaan buku geografi
5 . 2 . 3 . 27 . 7	Belanja modal Pengadaan buku astronomi
5 . 2 . 3 . 27 . 8	Belanja modal Pengadaan buku arkeologi
5 . 2 . 3 . 27 . 9	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra
5 . 2 . 3 . 27 . 10	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan
5 . 2 . 3 . 27 . 11	Belanja modal Pengadaan buku sejarah
5 . 2 . 3 . 27 . 12	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya
5 . 2 . 3 . 27 . 13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
5 . 2 . 3 . 27 . 14	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
5 . 2 . 3 . 27 . 15	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan
5 . 2 . 3 . 27 . 16	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
5 . 2 . 3 . 27 . 17	Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia
5 . 2 . 3 . 27 . 18	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa
5 . 2 . 3 . 27 . 19	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan
5 . 2 . 3 . 27 . 20	Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan
5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5 . 2 . 3 . 27 . 22	Belanja modal Pengadaan buku naskah
5 . 2 . 3 . 27 . 23	Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk)
5 . 2 . 3 . 27 . 24	Belanja modal Pengadaan mikrofilm
5 . 2 . 3 . 27 . 25	Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe
5 . 2 . 3 . 27 . 26	Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
5 . 2 . 3 . 28 . 1	Belanja modal Pengadaan lukisan/foto
5 . 2 . 3 . 28 . 2	Belanja modal Pengadaan patung
5 . 2 . 3 . 28 . 3	Belanja modal Pengadaan ukiran

5 . 2 . 3 . 28 . 4	Belanja modal Pengadaan pahatan
5 . 2 . 3 . 28 . 5	Belanja modal Pengadaan batu alam
5 . 2 . 3 . 28 . 6	Belanja modal Pengadaan maket/miniatur/diorama
5 . 2 . 3 . 28 . 7	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian Lainnya
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
5 . 2 . 3 . 29 . 1	Belanja modal Pengadaan hewan kebun binatang
5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja modal Pengadaan ternak
5 . 2 . 3 . 29 . 3	Belanja modal Pengadaan tanaman
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
5 . 2 . 3 . 30 . 1	Belanja modal Pengadaan senjata api
5 . 2 . 3 . 30 . 2	Belanja modal Pengadaan radar
5 . 2 . 3 . 30 . 3	Belanja modal Pengadaan mobil water canon
5 . 2 . 3 . 30 . 4	Belanja modal Pengadaan borgol
5 . 2 . 3 . 30 . 5	Belanja modal Pengadaan sangkur/bayonet
5 . 2 . 3 . 30 . 6	Belanja modal Pengadaan perisai/tameng
5 . 2 . 3 . 30 . 7	Belanja modal Pengadaan detektor logam
5 . 2 . 3 . 30 . 8	Belanja modal Pengadaan rompi anti peluru
5 . 2 . 3 . 30 . 9	Belanja modal Pengadaan pentungan
5 . 2 . 3 . 30 . 10	Belanja modal Pengadaan helm
5 . 2 . 3 . 30 . 11	Belanja modal Pengadaan alarm/sirene
5 . 2 . 3 . 30 . 12	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter
5 . 2 . 3 . 30 . 13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Keamanan lainnya

ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 12 Juli 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**ISMAIL THOMAS**



**Lampiran III : Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis  
Tata Cara Pergeseran Anggaran.**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
KELOMPOK PEMBIAYAAN, JENIS PEMBIAYAAN, OBYEK PEMBIAYAAN  
DAN RINCIAN OBYEK PEMBIAYAAN**

Tahun Anggaran 2009

6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ..... Kelompok Pembiayaan</b>
6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran ..... Jenis Pembiayaan Sebelumnya</b>
6.1.1.1	Pelampauan Penerimaan PAD ..... Obyek Pembiayaan
6.1.1.1.1	Pajak Daerah .....Rincian Obyek Pembiayaan
6.1.1.1.2	Retribusi Daerah
6.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
6.1.1.1.4	Lain-lain PAD yang sah
6.1.1.1.5	Pelampauan Penerimaan PAD
6.1.1.2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
6.1.1.2.1	Bagi Hasil Pajak
6.1.1.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak
6.1.1.2.3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
6.1.1.3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
6.1.1.3.1	Pelampauan Penerimaan Lain_lain Pendapatan Yang Sah
6.1.1.4	Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya
6.1.1.4.1	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung
6.1.1.4.2	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
6.1.1.4.3	Belanja Barang dan Jasa
6.1.1.4.4	Belanja Modal
6.1.1.4.5	Belanja Bunga
6.1.1.4.6	Belanja Subsidi
6.1.1.4.7	Belanja Hibah
6.1.1.4.8	Belanja Bantuan Sosial
6.1.1.4.9	Belanja Bagi hasil
6.1.1.4.10	Belanja Bantuan Keuangan
6.1.1.4.11	Belanja Tidak Terduga
6.1.1.4.12	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
6.1.1.6	Kegiatan Lanjutan
6.1.1.6.1	Anggaran sebelumnya ( SILPA )
6.1.2	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>
6.1.2.1	Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.1.1	Pencairan Dana Cadangan
6.1.3	<b>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</b>
6.1.3.1	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
6.1.3.1.1	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD yang dipisahkan
6.1.3.2	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
6.1.3.2.1	Pihak ketiga.....
6.1.4	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah</b>
6.1.4.1	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
6.1.4.1.1	Penerusan pinjaman.....
6.1.4.2	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain
6.1.4.2.1	Pemerintah daerah .....
6.1.4.3	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank
6.1.4.3.1	Penerimaan pinjaman dari BPD
6.1.4.3.2	Penerimaan Deviden tahun buku 2006

6.1.4.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank
6.1.4.4.1	Lembaga keuangan bukan bank .....
6.1.4.5	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah
6.1.4.5.1	Obligasi atas nama.....
6.1.4.5.2	Obligasi nomor.....
6.1.5	<b>Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman</b>
6.1.5.1	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
6.1.5.1.1	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman.....
6.1.6	<b>Penerimaan Piutang Daerah</b>
6.1.6.1	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
6.1.6.1.1	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah
6.1.6.1.2	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah
6.1.6.1.3	Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah
6.1.6.2	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6.1.6.2.1	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6.1.6.3	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain
6.1.6.3.1	Pemerintah daerah .....
6.1.6.4	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank
6.1.6.4.1	Bank .....
6.1.6.5	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank
6.1.6.5.1	Lembaga keuangan bukan bank .....
6.1.7	<b>Penerimaan Kembali Investasi Daerah</b>
6.1.7.1	Penerimaan kembali Investasi Daerah
6.1.7.1.1	Penerimaan Kembali Investasi Daerah
-	
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH .....Kelompok Pengeluaran Pembiayaan</b>
6.2.1	<b>Pembentukan Dana Cadangan ..... Jenis Pengeluaran Pembiayaan</b>
6.2.1.1	Pembentukan Dana Cadangan ..... Obyek Pengeluaran pembiayaan
6.2.1.1.1	Pembentukan Dana Cadangan untuk PON nomor... .. Rincian Obyek Pengeluaran Pembiayaan
6.2.1.1.2	Pembentukan Dana Cadangan untuk KPU nomor...
6.2.2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>
6.2.2.1	Badan usaha milik pemerintah (BUMN)
6.2.2.1.1	BUMN .....
6.2.2.2	Badan usaha milik daerah (BUMD)
6.2.2.2.1	Penyertaan modal untuk PERUSDA
6.2.2.2.2	Penyertaan modal untuk BPD Melak
6.2.2.2.3	Lembaga Penjamin Kredit
6.2.2.3	Badan usaha milik swasta
6.2.2.3.1	PT. ....
6.2.2.4	Deposito
6.2.3	<b>Pembayaran Pokok Utang</b>
6.2.3.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6.2.3.1.1	Pembayaran utang pokok jatuh tempo
6.2.3.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain
6.2.3.2.1	Pemerintah daerah .....
6.2.3.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank
6.2.3.3.1	Bank .....
6.2.3.4	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank
6.2.3.4.1	Lembaga keuangan bukan bank .....
6.2.3.5	Pembayaran Cicilan Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6.2.3.5.1	Penerusan pinjaman.....
6.2.3.6	Pembayaran Cicilan Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain
6.2.3.6.1	Pemerintah daerah .....
6.2.3.7	Pembayaran Cicilan Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank
6.2.3.7.1	Bank .....
6.2.3.8	Pembayaran Cicilan Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada

6.2.3.8.1	lembaga keuangan bukan bank Lembaga keuangan bukan bank .....
6.2.3.9	Pelunasan Obligasi daerah pada saat jatuh tempo
6.2.3.9.1	Obligasi atas nama....
6.2.3.9.2	Obligasi nomor.....
6.2.3.10	Pelunasan Obligasi daerah sebelum jatuh tempo
6.2.3.10.1	Obligasi atas nama....
6.2.3.10.2	Obligasi nomor.....
6.2.4	<b>Pemberian Pinjaman Daerah</b>
6.2.4.1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah
6.2.4.1.1	Penyaluran modal bagi koperasi pegawai negeri kab. kutai barat
6.2.4.1.2	Penyaluran modal bagi usaha pemuda keagamaan
6.2.4.1.3	Penyaluran dana UKM
6.2.4.1.4	Penyaluran UBK ( 223 kampung )
6.2.4.1.5	Penyaluran UBK untuk organisasi keagamaan
6.2.4.1.6	Dana Revolving fund system untuk pengadaan obatdan gizi pada RSUD
6.2.4.2	Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain
6.2.4.2.1	Pemerintah daerah.....
6.3	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>
6.3.1	<b>Pembiayaan Netto</b>
6.3.1.1	Pembiayaan Netto
6.3.1.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan
6.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>
6.4.1	<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan</b>
6.4.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan
6.4.1.1.1	Pembiayaan Netto
7	<b>PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)</b>
7.1	<b>PENERIMAAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)</b>
7.1.1	<b>Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>
7.1.1.1	Penerimaan PFK - IWP
7.1.1.1.1	Penerimaan PFK - IWP
7.1.1.2	Penerimaan PFK - Taspen
7.1.1.2.1	Penerimaan PFK - Taspen
7.1.1.3	Penerimaan PFK - Askes
7.1.1.3.1	Penerimaan PFK - Askes
7.1.1.4	Penerimaan PFK - PPh Pusat
7.1.1.4.1	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21
7.1.1.4.2	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22
7.1.1.4.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
7.1.1.4.4	Penerimaan PFK - PPh Ps. 25
7.1.1.5	Penerimaan PFK - PPn Pusat
7.1.1.5.1	Penerimaan PFK - PPn Pusat
7.1.1.6	Penerimaan PFK - Taperum
7.1.1.6.1	Penerimaan PFK - Taperum
7.1.1.7	Penerimaan PFK - Lainnya
7.1.1.7.1	Penerimaan PFK - Lainnya
7.2	<b>PENGELUARAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)</b>
7.2.1	<b>Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>
7.2.1.1	Pengeluaran PFK - IWP
7.2.1.1.1	Pengeluaran PFK - IWP
7.2.1.2	Pengeluaran PFK - Taspen
7.2.1.2.1	Pengeluaran PFK - Taspen
7.2.1.3	Pengeluaran PFK - Askes
7.2.1.3.1	Pengeluaran PFK- Askes
7.2.1.4	Pengeluaran PFK - PPh Pusat
7.2.1.4.1	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21
7.2.1.4.2	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22
7.2.1.4.3	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
7.2.1.4.4	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 25

7 . 2 . 1 . 5	Pengeluaran PFK - PPn Pusat
7 . 2 . 1 . 5 . 1	Pengeluaran PFK - PPn Pusat
7 . 2 . 1 . 6	Pengeluaran PFK - Taperum
7 . 2 . 1 . 6 . 1	Pengeluaran PFK - Taperum
7 . 2 . 1 . 7	Pengeluaran PFK - Lainnya
7 . 2 . 1 . 7 . 1	Pengeluaran PFK - Lainnya

ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 12 Juli 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**ISMAIL THOMAS**